



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENGUATAN LAYANAN KRL JABODETABEK MELALUI PENAMBAHAN ARMADA DAN SUBSIDI TARIF

**Ulayya Sarfina**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[ulayya.sarfina@dpr.go.id](mailto:ulayya.sarfina@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat layanan transportasi massal di kawasan Jabodetabek dengan melakukan penyesuaian anggaran bagi layanan KRL Commuter Line. Komitmen ini mencakup alokasi dana sebesar Rp5 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperuntukkan bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KAI Commuter untuk pengadaan 30 rangkaian baru guna memperkuat armada yang saat ini beroperasi. Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi persetujuannya terkait rencana tersebut saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat pada 4 November 2025. Saat ini, KAI telah memesan 12 *trainset* kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, dengan 4 *trainset* di antaranya telah diterima dan tengah menjalani uji teknis. Seluruh rangkaian baru hasil produksi INKA ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. KAI menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan target penyelesaian dalam waktu satu tahun agar manfaat kebijakan ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

Penambahan armada ini merupakan respons atas meningkatnya jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang terus melonjak dalam dua tahun terakhir. Hingga Oktober 2025, jumlah penumpang telah mencapai sekitar 280 juta orang, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan bahwa KRL tetap menjadi moda transportasi utama masyarakat perkotaan, khususnya bagi pekerja, pelajar, pedagang, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan transportasi publik cepat dan terjangkau. Dengan hadirnya tambahan rangkaian baru, frekuensi perjalanan dapat diperbanyak, waktu tunggu di stasiun dapat dipersingkat, serta kepadatan penumpang di jam sibuk dapat dikurangi secara efektif.

Selain pengadaan rangkaian baru, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan tarif melalui kebijakan subsidi tiket KRL. Melalui skema *Public Service Obligation* (PSO), Kemenhub mengalokasikan sekitar Rp17 triliun per tahun, setara dengan menanggung sekitar 60% dari biaya operasional riil. Dengan adanya subsidi tersebut, tarif perjalanan KRL dapat tetap dipertahankan di kisaran Rp3.000,00 hingga Rp5.000,00, jauh di bawah harga keekonomian. Skema ini tidak hanya memberi manfaat bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga bagi pedagang kecil, petani yang mengirim hasil panen ke kota, serta pelajar yang beraktivitas setiap hari di wilayah Jabodetabek.

Menteri Perhubungan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses terhadap transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan dalam jangka pendek. Penambahan armada diharapkan diikuti dengan langkah strategis jangka panjang, antara lain peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan, optimalisasi jadwal perjalanan, serta peningkatan aspek keselamatan dan perawatan/pemeliharaan sarana. Selain itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia di

sektor perkeretaapian juga menjadi faktor penting agar peningkatan layanan KRL berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten. Dengan perbaikan kapasitas dan kualitas layanan, diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang, yang pada gilirannya membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon di Jabodetabek.

## Atensi DPR

Komitmen pemerintah menambah 30 rangkaian baru KRL Jabodetabek senilai Rp5 triliun dan mempertahankan subsidi tiket Rp17 triliun per tahun merupakan langkah strategis. Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan peningkatan kapasitas layanan. Selain itu, kebijakan subsidi harus tetap tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang bergantung pada transportasi publik. Komisi V DPR RI juga perlu mencermati kesiapan infrastruktur, keselamatan, serta koordinasi antarlembaga agar operasional berjalan optimal. Dengan pengawasan yang konstruktif, Komisi V DPR RI dapat memastikan kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan mobilitas masyarakat, pengurangan kemacetan, dan penguatan sistem transportasi publik yang berkelanjutan di kawasan Jabodetabek.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 4 November 2025;  
ekonomi.bisnis.com, 4 November 2025;  
investor.id, 4 November 2025;  
kumparan.com, 4 November 2025; dan  
tempo.co, 4 November 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*